

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdikari dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, tentunya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Implementasi nyata dari prinsip demokrasi yang dipegang oleh Indonesia adalah ditandai dengan perubahan besar dalam lanskap sosial-politik negara sejak tahun 1998. Peluang dan ruang yang luas diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok tertentu, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis keagamaan, untuk terlibat dan berperan aktif dalam proses demokrasi (Surbakti dan Supriyanto, 2013).

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, menjadi sebuah momen penting dalam perjalanan politik Indonesia yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan lapisan masyarakat. Pesta demokrasi tersebut juga menandai fase penting dalam transformasi politik nasional, terutama dengan meningkatnya partisipasi hadir (*voter turnout*) dari kalangan Generasi Z (Gen Z). Generasi tersebut diklasifikasikan sesuai kelompok usia muda yang lahir setelah tahun 1997 hingga tahun 2012. Gen Z juga, dikenal sangat akrab dengan teknologi digital dan internet, serta juga memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu sosial. Berdasarkan data dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa sebanyak 46,8 juta pemilih Gen Z

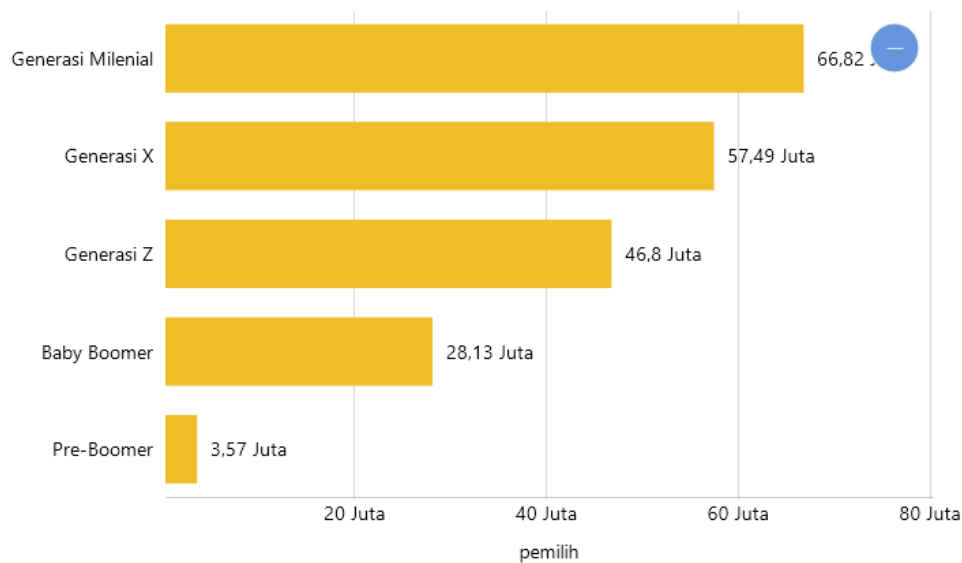
termasuk dalam DPT, yang mana mewakili sekitar 22,85% dari total 204,8 juta pemilih. Bersama dengan generasi milenial, Gen Z mendominasi pemilih Pemilu 2024 dengan persentase 56,45%. Adapun rincian perbandingan jumlah DPT Gen Z dengan Gen Milenial pada tabel dibawah berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Pemilih	Persenan Total
Generasi Z (tahun lahir 1995 – 2012)	46.800.161	22,85%
Generasi Milenial (1980 – 1994)	66.822.389	33,60%
Total Gen Z + Gen Milenial	113.622.550	56,45%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Republika dan Katadata

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, menunjukan bahwa Gen Z yang jumlahnya hampir mencapai 50 juta orang menjadikan mereka sebagai kekuatan baru dalam politik elektoral, yang mana tidak hanya sebagai pemilih pasif, akan tetapi juga sebagai subjek aktif dalam membentuk opini publik dan menggerakkan narasi politik melalui media sosial. Selain data diatas, KPU melalui *databooks* juga merilis rincian visualisasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024 lalu yang meliputi Gen Milenial, Gen X, Gen Z, *Baby Boomer*, dan *Pre-Boomer*. Adapun rincian datanya melalui gambar dibawah berikut:



Sumber: databooks.katadata.co.id.

Gambar 1.1 Data Jumlah Pemilih Pilkada 2024 Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa pemilih untuk generasi Z tercatat 57,49 juta dengan menempati posisi ketiga, sedangkan, untuk posisi pertama ditempati oleh generasi milenial dengan jumlah pemilih sebesar 66,82 juta. Posisi terakhir ditempati oleh *pre-boomer* dengan jumlah pemilih sebesar 3,5 juta. Kendati demikian, masih perlu adanya peningkatan partisipasi generasi Z terutama untuk kaum minoritas di Indonesia.

Besarnya jumlah pemilih Generasi Z pada Pemilu 2024 tidak hanya merepresentasikan kekuatan demografis, tetapi juga menunjukkan peran strategis mereka dalam menentukan arah politik bangsa. Dengan karakteristik sebagai *digital natives*, Generasi Z memiliki akses yang luas terhadap informasi politik melalui media sosial, sehingga mereka berperan aktif dalam menyebarkan narasi, membangun opini publik, sekaligus memengaruhi perilaku politik kelompok usia lainnya. Hal ini menjadikan Generasi Z bukan sekadar pemilih kuantitatif, tetapi juga pemilih kualitatif yang mampu menggerakkan dinamika politik di tingkat

nasional maupun lokal. Survei Alvara *Research Center* (2023) menegaskan bahwa isu-isu yang paling diperhatikan oleh Gen Z dalam menentukan pilihan adalah pendidikan, lapangan kerja, korupsi, dan keberlanjutan lingkungan. Fokus isu tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung lebih rasional dan visioner dalam memilih pemimpin dibandingkan sekadar terpengaruh oleh politik identitas atau figur semata. Dengan demikian, Gen Z berpotensi menjadi agen perubahan dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, asalkan partisipasi politik mereka dapat terus ditingkatkan dan diarahkan pada pemahaman politik yang sehat.

Fenomena meriahnya partisipasi politik Gen Z berdasarkan penjelasan data diatas, tentunya tidak luput dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang membentuk pola kesadaran di diri mereka masing-masing. Salah satu faktor yang berpengaruh signifikan adalah kehadiran nilai-nilai agama yang telah ditanamkan oleh lingkungan sosial terdekat, termasuk komunitas keagamaan seperti Gereja. Salah satu Gereja di Indonesia, yakni Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang, yang juga sebagai institusi religius dan komunitas sosial, memiliki potensi besar dalam membentuk pandangan politik dan moral generasi muda jemaatnya.

Menurut Casanova (1994) dalam bukunya yang bertajuk, *Public Religions in the Modern World*, mengaskan bahwa dalam konteks masyarakat modern agama, termasuk Gereja didalamnya, mengalami proses “*deprivatisasi*.” Proses tersebut diartikan sebagai kembali muncul di ruang publik dan mengambil peran aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Lebih lanjut, Casanova juga menjelaskan bahwa Gereja tidak lagi hanya mengurus urusan internal dan spiritual jemaat, akan tetapi juga menjadi bagian dari aktor publik yang bisa memengaruhi wacana politik, terutama

dalam menyuarkan keadilan, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara. Hal tersebut menjadi aksi nyata Gereja dalam praktiknya, sering kali tampil sebagai bentuk kekuatan moral yang mengkritisi kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan etika agama Kristiani (Borradori, 2003).

Gereja dalam konteks ini, akan memainkan peran sebagai agen mobilisasi sosial yang mendorong keterlibatan politik jemaatnya, termasuk partisipais hadir (*voter turnout*) mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi. Kehadiran mereka di TPS sendiri tidak hanya sebagai bentuk hak, akan tetapi juga sebagai kewajiban politik yang mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap masa depan bangsa.

Voter turnout sendiri merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dalam studi ilmu politik, *voter turnout* dianggap sebagai bentuk paling minimal dari partisipasi politik, namun sangat penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Menurut Wolfinger dan Rosenstone (1980) dalam bukunya yang bertajuk, *Who Votes* menjelaskan bahwa kehadiran pemilih di TPS dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni sumber daya, hambatan kelembagaan, dan keterlibatan politik. *Voter turnout* juga dijelaskan melalui perspektif ekonomi politik oleh Downs (1957) dalam bukunya yang bertajuk *An Economic Theory of Democracy*. Menurut Downs (1957) menjelaskan bahwa setiap individu akan memilih jika manfaat dari ikut serta lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks generasi muda, partisipasi mereka dinilai akan rendah jika mereka

merasa suara mereka tidak berdampak. Oleh karena itu, Gereja sebagai lembaga pembentuk nilai dapat memberi motivasi moral dan harus menurunkan biaya psikologis untuk berpartisipasi.

Fenomena keterlibatan gereja di Indonesia, terutama dalam aspek politik semakin nyata, terutama dalam isu-isu seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok minoritas. Meskipun konstitusi Indonesia secara nyata tidak menerapkan prinsip sekularisme secara eksplisit, akan tetapi menjadikan prinsip netralitas negara terhadap agama sebagai dasar dalam menjaga kehidupan berbangsa yang plural (Asshiddiqie, 2006). Kendati demikian, batas antara peran keagamaan dan politik sering kali kabur, terutama ketika Gereja terlibat langsung dalam wacana politik praktis seperti Pemilu atau advokasi kebijakan tertentu (Mujiburrahman, 2013). Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana gereja dapat terlibat dalam politik tanpa menimbulkan konflik kepentingan serta tanpa melanggar prinsip kebebasan beragama dan netralitas negara.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana pengaruh nilai-nilai agama yang disampaikan oleh Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang terhadap keputusan politik dan partisipasi hadir (*voter turnout*) Gen Z sebagai jemaatnya dalam Pemilu 2024. Penelitian ini juga berupaya memahami motivasi dan pengalaman politik Gen Z sebagai kelompok strategis dalam demokrasi, sekaligus menelaah bagaimana institusi keagamaan memaknai dan memainkan perannya dalam mendorong partisipasi politik generasi muda di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Generasi Z HKBP Kertanegara terhadap pemilihan umum 2024?
2. Bagaimana pengaruh nilai-nilai agama terhadap keputusan politik Generasi Z HKBP Kertanegara sebagai pemilih dalam Pemilu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi secara mendalam persepsi Generasi Z jemaat HKBP Kertanegara terhadap Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh nilai-nilai agama yang dianut jemaat HKBP Kertanegara terhadap keputusan politik Generasi Z sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, terutama dalam bidang *voter turnout* dan peran institusi agama dan/atau aktor sosial keagamaan dalam demokrasi elektoral. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika *voter turnout* Generasi Z yang terhubung dengan nilai-nilai religius, serta membuka ruang bagi eksplorasi teori-teori partisipasi yang juga mempertimbangkan konteks lokal, budaya hingga spiritualitas,

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang dan institusi keagamaan lainnya terkait strategi yang efektif dalam mendorong keterlibatan politik generasi muda, khususnya dalam meningkatkan kehadiran pemilih di TPS. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan politik, dan komunitas sipil sebagai dasar penyusunan program peningkatan partisipasi politik yang melibatkan peran aktif institusi agama dalam demokrasi.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan. Kehadiran penelitian terdahulu juga untuk mendeskripsikan topik penelitian secara keseluruhan. Maka, dalam penelitian terdahulu peneliti mencantumkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z	Moh. Arief Rakhman Haryadi	2019	Penelitian ini mengkaji bagaimana Generasi Z, sebagai digital native, mulai memahami dan merespons dinamika politik di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2019. Mereka mengalami kebingungan

				karena suasana politik yang memaksa mereka berpihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi ini mulai memiliki kesadaran politik akibat paparan informasi digital yang tinggi.
2.	Analisis Persepsi Generasi Z terhadap Penggunaan Isu Agama dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024	Syamsul Ma Arif, Rahmawati, Lusi Andriyani	2022	Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi pemuda dalam demokrasi, khususnya Generasi Z yang menghadapi politisasi isu agama. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi aktif Gen Z dalam pemilu perlu ditingkatkan melalui edukasi politik agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh kampanye berbasis identitas.
3.	Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap Perilaku Memilih para Pemilih Pemula (<i>The</i>	Meike Kurniawati	2023	Penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi sederhana untuk mengukur pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku memilih. Hasilnya menunjukkan bahwa teman (7,9%) dan

	<i>Influence of Family, Religious Leaders and Friends on Voting Behavior of New Voters)</i>			tokoh agama (7,1%) memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan orang tua (1,2%) terhadap keputusan memilih pemilih pemula dalam Pemilu 2024.
4.	Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024 di SMK Taruna Pekanbaru	Muhammad Syafii Sitorus & Siti Hazar Sitorus	2023	Penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar SMK. Ditemukan bahwa tingkat kesadaran politik mereka masih beragam, dan edukasi politik sangat diperlukan agar mereka dapat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan kritis dalam menyambut Pemilu 2024.
5.	Dinamika Partisipasi Politik pada Generasi Z: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi PPKn	Raistin Nur Abidin	2024	Studi ini menggunakan metode kualitatif dan menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa aktif secara politik, terlibat dalam organisasi kampus dan kegiatan pemilu, sedangkan sebagian lainnya pasif karena kurang minat atau kurang pemahaman. Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu penentu utama perbedaan ini.

6.	Pentingnya Kesadaran dan Partisipasi Gen Z Terhadap Dinamika Politik Domestik di era Globalisasi 4.0	Putri Zelsi Arisandi	2025	Penelitian ini menyoroti sikap Generasi Z terhadap politisasi agama dalam Pilpres 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak isu agama digunakan dalam kampanye, dan lebih memilih calon berdasarkan program dan visi misi. Ini menunjukkan kematangan politik yang tumbuh pada Generasi Z.
----	--	----------------------	------	---

1.6. Landasan Teori

Pada penelitian ini, landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah Relasi Gereja dan Politik, Partisipasi Hadir (*Voter Turnout*), dan Teori Generasi.

1.6.1 Relasi Gereja dan Politik

Relasi antara Gereja dan politik merupakan salah satu bentuk dinamika yang sifatnya paling kompleks dalam sejarah pemikiran sosial dan politik. Menurut St. Agustinus (2003) dalam teori politik klasiknya yang bertajuk, *De Civitate Dei* (Kota Allah) menjelaskan perbedaan antara *Civitas Dei* (kota Allah) dan *Civitas Terrena* (kota dunia), yakni Gereja diposisikan sebagai entitas moral dan spiritual yang terpisahkan dari kekuasaan duniawi namun memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik karena membawa nilai-nilai etis

universal Sementara itu, Weber (2005) dalam bukunya yang bertajuk, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* menunjukkan bahwa etika agama, khususnya Protestanisme, memengaruhi orientasi politik dan ekonomi masyarakat Barat.

Weber (2005) turut menggarisbawahi bahwa agama tidak hanya menjadi sumber kekuatan privat, akan tetapi juga memiliki fungsi sosial-politik yang kuat dalam membentuk kesadaran kolektif dan tindakan politik masyarakat. Dalam konteks ini, Gereja dipahami tidak hanya sebagai sebuah institusi spritual, tetapi juga sebagai aktor kultural dan ideologis yang mampu membentuk opini publik dan arah kebijakan melalui pengaruh nilai-nilai moralnya.

Menurut Casanova (1994) yang juga sebagai seorang sosiolog agama kontemporer dalam bukunya yang bertajuk, *Public Religions in the Modern World* menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat modern agama, termasuk Gereja didalamnya, telah mengalami “*deprivatisasi*,” yakni diartikan kembali muncul di ruang publik dan mengambil peran aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Lebih lanjut, Casanova (1994) menjelaskan bahwa Gereja tidak lagi hanya mengurus urusan internal dan spiritual jemaat, akan tetapi juga menjadi bagian dari aktor publik yang bisa memengaruhi wacana politik, terutama dalam menyuarakan keadilan, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis, relasi antara agama dan politik bersifat lebih majemuk dan berlapis. Negara secara konstitusional menjamin kebebasan beragama, namun tidak memisahkan

secara mutlak antara agama dan negara. Gereja sebagai salah satu institusi keagamaan memiliki posisi yang strategis dalam membentuk sikap politik umatnya, termasuk terhadap Gen Z, terutama ketika menyangkut partisipasi dalam pemilu sebagai wujud aktualisasi tanggung jawab warga negara dalam demokrasi.

Pada penelitian ini, teori utama dari relasi gereja dan politik yang digunakan adalah teori dari Casanova (1994). Teori tersebut tidak hanya menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, agama tidak lagi hanya dipraktikkan dalam ruang privat, akan tetapi sudah memasuki ranah publik dan aktif mempengaruhi kebijakan serta wacana sosial-politik. Teori dari Casanova juga turut menegaskan Gereja yang *deprivatisasi* berperan sebagai agen dalam pembentukan opini politik, mendorong jemaat muda untuk aktif dalam Pemilu 2024 lalu. Sehingga dengan menggunakan teori ini, peneliti bisa menjelaskan bagaimana Gen Z yang terhubung dengan Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang tidak hanya menerima ajaran agama secara spiritual, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan politik yang dibawa Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang untuk terlibat aktif dalam Pemilu.

1.6.2 Teori Partisipasi Politik dan Voter Turnout

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sebagai warga negara dalam upaya memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara terstruktur maupun spontan, berlangsung secara konsisten atau sesekali saja, dan dapat bersifat damai

maupun penuh kekerasan. Selain itu, partisipasi politik juga bisa dilakukan melalui cara-cara yang sah maupun tidak sah, serta bisa membawa hasil yang nyata ataupun tidak (Huntington et al., 1994:4).

Partisipasi hadir (*voter turnout*) merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dalam studi ilmu politik, voter turnout dianggap sebagai bentuk paling minimal dari partisipasi politik, namun sangat penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh niat politik, akan tetapi juga oleh struktur sosial, institusi, dan nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat. Menurut Wolfinger dan Rosenstone (1980) dalam bukunya yang bertajuk, *Who Votes* menjelaskan bahwa setiap keputusan seseorang untuk hadir di Tempat Pemilahan Suara (TPS) dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya meliputi pendidikan, waktu, dan uang, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan aktif ikut serta dalam proses penyelenggaraan Pemilu

2. Hambatan Kelembagaan (*Legal and Institutional Barriers*)

Pada faktor hambatan kelembagaan mempengaruhi rangkaian prosedur pendaftaran pemilih, kemudahan untuk datang ke TPS, serta peraturan administratif lainnya,

3. Keterlibatan Politik (*Political Engagement*)

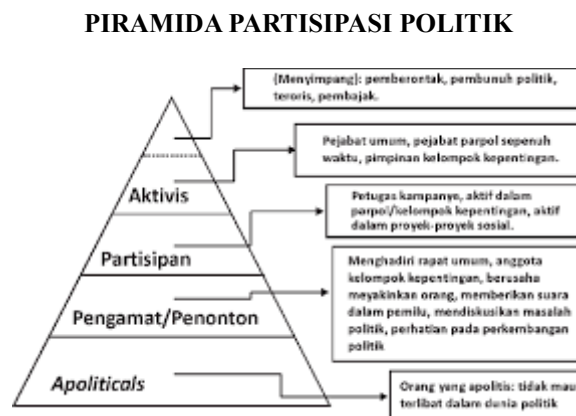
Pada keterlibatan politik menjelaskan sejauh mana seseorang merasa bahwa partisipasi mereka dinilai penting dan bermakna dalam sistem demokrasi.

Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995) juga dalam buku mereka yang bertajuk, *Voice and Equality*, menjelaskan bahwa setelah mereka mengembangkan model *civic voluntarism* yang melengkapi teori sebelumnya. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama mengapa seseorang berpartisipasi dalam politik, yakni:

1. Apakah mereka bisa? (*Resources*)
2. Apakah mereka mau? (*Motivation and Engagement*)
3. Apakah mereka diminta untuk ikut serta? (*Mobilization*)

Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menjelaskan bahwa Gereja yang merupakan institusi sosial dianggap memiliki peran penting dalam dimensi mobilisasi. Melalui ajakan langsung, komunitas keagamaan dapat membentuk norma sosial bahwa memilih adalah tindakan moral dan tanggung jawab spiritual. *Voter turnout* juga dijelaskan melalui perspektif ekonomi politik oleh Downs (1957) dalam bukunya yang bertajuk *An Economic Theory of Democracy*. Menurut Downs (1957) menjelaskan bahwa setiap individu akan memilih jika manfaat dari ikut serta lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks generasi muda, partisipasi mereka dinilai akan rendah jika mereka merasa suara mereka tidak berdampak. Oleh karena itu, Gereja sebagai lembaga pembentuk nilai dapat memberi motivasi moral dan harus menurunkan biaya psikologis untuk berpartisipasi.

Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilu, serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.



Gambar 1.2 Partisipasi Piramida Politik (dalam Soemarno, 2009)

Pada penelitian ini yang berfokus pada partisipasi hadir (*voter turnout*) Gen Z jemaat Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang dalam Pemilu 2024, peneliti akan menggunakan teori, Wolfinger dan Rosenstone (1980). Mengapa demikian, karena bukan hanya fokus *voter turnout*, tetapi juga sikap politik atau niat memilih. Gereja, sebagai aktor sosial, berpotensi mampu memperkuat keterlibatan politik (*political engagement*) dan mengurangi hambatan kognitif terhadap partisipasi pemilu, khususnya di kalangan Gen Z. Nilai-nilai agama, ajakan moral, dan lingkungan sosial dalam gereja dapat menjadi bentuk *resources* dan *engagement* baru yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam pendekatan rasional semata.

1.6.3 Teori Generasi

Menurut Mannheim (1952) menjelaskan bahwa teori generasi merupakan konsep dalam ilmu sosial yang menjelaskan perbedaan cara pandang, perilaku, dan nilai-nilai antarkelompok usia berdasarkan pengalaman historis, budaya, dan teknologi yang membentuk mereka saat tumbuh dewasa. Mannheim juga menjelaskan bahwa generasi bukan hanya soal usia biologis, tetapi juga kesamaan pengalaman sosial yang membentuk kesadaran kolektif mereka

1. Generasi sebagai konstruksi sosial (Mannheim, 1952)

Mannheim berpendapat bahwa generasi terbentuk karena kelompok usia tertentu mengalami peristiwa sejarah yang sama dalam periode formatif hidupnya sekitar usia 15–25 tahun. Misalnya, kelompok yang tumbuh saat masa reformasi politik, krisis ekonomi, atau revolusi teknologi akan memiliki kesadaran sosial yang berbeda dibanding generasi lain.

2. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z biasanya didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Menurut penelitian dari Twenge (2017) dan Dimock (Pew Research Center, 2019), karakteristik utama Gen Z meliputi:

- a. Melek digital dan sangat tergantung pada teknologi;
- b. Lebih individualistik tetapi juga inklusif;
- c. Memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan;

- d. Kritis terhadap otoritas dan lebih suka pendekatan horizontal (*egaliter*); dan
- e. Mengakses informasi politik melalui media sosial, bukan media.

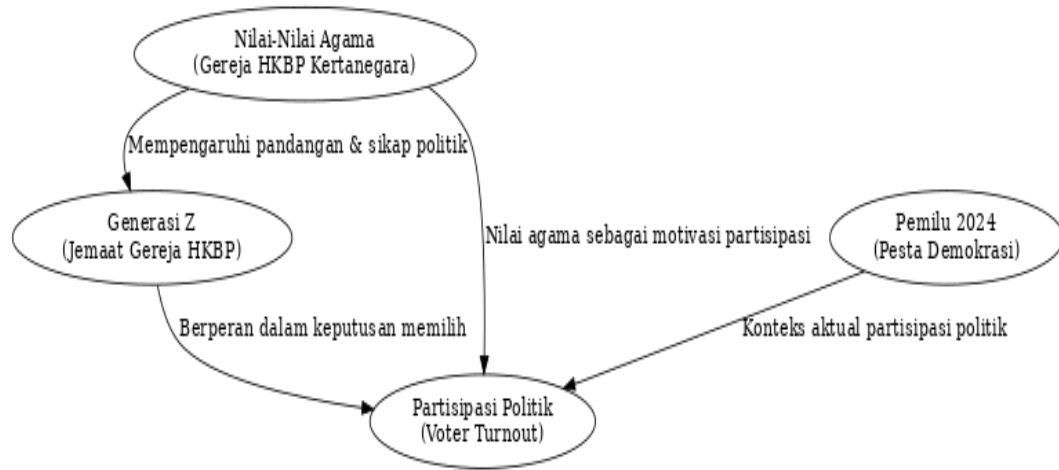
1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.2. Operasional Konsep

Konsep	Sub-Konsep / Dimensi	Indikator	Pertanyaan Panduan / Fokus Kajian
Nilai Agama (dari Gereja)	Ajaran moral & sosial	Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, cinta sesama	Apa saja nilai agama yang paling ditekankan oleh gereja dalam kehidupan sosial-politik?
	Penyampaian nilai	Kotbah, persekutuan pemuda, diskusi iman	Bagaimana gereja menyampaikan nilai-nilai agama kepada Generasi Z?
Partisipasi Hadir (<i>Voter Turnout</i>)	Kehadiran di TPS	Hadir atau tidak pada hari pemilu	Apakah kamu datang ke TPS dan menggunakan hak pilihmu? Mengapa atau mengapa tidak?
	Motivasi memilih	Kesadaran moral, ajakan gereja, lingkungan	Apa alasan utama kamu memilih? Apakah pengaruh gereja turut

			mendorong keputusan itu?
Generasi Z	Karakteristik digital & kritis	Sumber informasi, keterbukaan, kecenderungan politik	Dari mana kamu biasanya mendapat informasi politik? Bagaimana kamu menilai politik saat ini?
	Keterlibatan sosial-politik	Diskusi, relasi dengan isu politik, antusiasme pemilu	Apakah kamu pernah berdiskusi atau terlibat dalam isu-isu politik bersama komunitas gereja?

1.8. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

1. Latar Demokrasi Pemilu 2024

Indonesia sebagai negara demokratis menjadikan pemilu sebagai wujud utama kedaulatan rakyat. Salah satu indikator vital dalam keberhasilan pemilu adalah tingkat *voter turnout*, yaitu sejauh mana warga negara menggunakan hak pilihnya di TPS Pemilu 2024 menjadi penting karena melibatkan jumlah pemilih muda yang sangat besar, terutama dari Gen Z.

2. Generasi Z sebagai Pemilih Utama

Gen Z yang lahir dari tahun 1997 hingga tahun 2012 mendominasi jumlah pemilih tetap nasional. Mereka dikenal dengan karakter yang *digital-native*, kritis, dan cenderung skeptis terhadap institusi formal, termasuk politik. Kendati demikian, keterlibatan politik mereka dapat tumbuh jika nilai yang ditawarkan sejalan dengan identitas dan moralitas yang mereka anut.

3. Peran Gereja sebagai Agen Sosial dan Moral

Gereja, dalam hal ini HKBP Kertanegara Kota Semarang, tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai komunitas yang membentuk nilai, sikap, dan tindakan sosial-politik. Menurut Casanova (1994), agama dapat hadir kembali dalam ruang publik melalui fungsi sosial dan moralnya termasuk mendorong partisipasi politik warga.

4. Nilai-Nilai Agama dan Partisipasi Hadir dalam Pemilu 2024

Gereja sebagai institusi agama bertujuan untuk menyampaikan ajaran yang mencakup tanggung jawab sosial dan moral, seperti keadilan, kejujuran, dan solidaritas. Nilai-nilai ini dapat memotivasi jemaat, terutama anak muda, khususnya Gen Z untuk tidak hanya peduli, akan tetapi juga hadir dan berpartisipasi langsung dalam pemilu, sebagai bentuk tanggung jawab iman dan kewarganegaraan.

5. Teori Partisipasi Hadir (*Voter Turnout*)

Menurut teori partisipasi hadir, keterlibatan pemilih di TPS dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kepercayaan terhadap sistem, efikasi politik, rasa tanggung jawab warga, dan pengaruh komunitas. Wolfinger dan Rosenstone (1980) menyatakan bahwa lingkungan sosial seperti gereja dapat menjadi insentif atau tekanan moral bagi individu untuk hadir memilih.

6. Fokus Kasus

Jemaat Generasi Z di HKBP Kertanegara, Semarang Studi ini secara spesifik menelusuri bagaimana nilai agama yang diajarkan dan dikomunikasikan oleh HKBP Kertanegara memengaruhi persepsi dan tindakan politik generasi Z sebagai pemilih pada Pemilu 2024 lalu.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam prosesnya, metode penelitian kualitatif memanfaatkan landasan teori yang memiliki perspektif subjektif. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif mengutamakan pengamatan fenomena serta mendalami substansi dari fenomena yang diteliti. Selain itu, dapat mengembangkan konsep pada masalah yang akan diteliti, serta melihat realitas yang berkaitan dengan landasan teori. Menurut Creswell (2007) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memaknai masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif digunakan untuk analisis dengan pendekatan induktif untuk memaknai suatu konsep dan memberikan deskripsi pada masalah yang diangkat dalam topik ini.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai pengaruh Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang terhadap partisipasi politik Gen Z dalam Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif sangat tepat untuk menganalisis makna dan pengalaman subjektif para jemaat, terutama Gen Z, dalam mengaitkan nilai-nilai agama dengan

keputusan politik mereka, serta bagaimana Gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang mempengaruhi *voter turnout* mereka.

1.9.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial ataupun kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Penelitian kualitatif menguji teori dengan cara merinci hipotesis-hipotesis yang spesifik lalu mengumpulkan data-data untuk mendukung atau menambah hipotesis-hipotesis tersebut (Cresswell, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Creswell (2007) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu metode yang memiliki sifat eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*). Suatu kasus dikatakan menarik untuk diteliti karena kasus tersebut memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Pendekatan studi kasus akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang lebih kaya dan mendalam tentang interaksi antara agama dan politik di komunitas ini.

1.9.3. Jenis dan Data Penelitian

Sumber data merupakan kumpulan data yang diperoleh dari hasil informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, dapat didefinisikan sebagai suatu sumber data yang langsung memberikan data bagi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti dalam memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan Pemuka Agama HKBP Kertanegara Semarang dan Gen Z HKBP Kertanegara.
2. Data Sekunder, dapat didefinisikan sebagai suatu sumber data yang tidak langsung memberikan data bagi peneliti, contohnya yakni data yang didapatkan melalui pihak lain ataupun dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dengan cara mengakses berbagai jurnal dan berita yang tercantum pada situs atau website di internet yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian metode kualitatif, kualitas hasil penelitian akan sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, penentuan instrumen penelitian harus dilakukan secara hati-hati karena akan sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, seperti:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Peneliti melakukan wawancara dengan teknik tidak terstruktur yakni proses wawancara dilakukan tanpa menggunakan acuan pada poin-poin tertentu. Wawancara akan dilakukan secara mendalam terhadap subjek penelitian, yaitu jemaat Gen Z dan tokoh-tokoh dari Gereja HKBP

Kertanegara, Kota Semarang untuk memperoleh data tentang pengalaman, nilai agama, dan motivasi mereka dalam menggunakan hak pilih di Pemilu 2024.

2. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data melalui berbagai catatan atau berbagai peristiwa masa lalu yang berupa tulisan, gambar, ataupun karya seseorang. Dokumen ini akan dijadikan sebagai data pelengkap dari data hasil observasi dan wawancara, seperti laporan, regulasi, foto, dan lain sebagainya.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan secara berkelanjutan dan tuntas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (2014). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data, dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan meringkas dengan memilih poin-poin pokok dan penting yang didapatkan dari suatu data. Sehingga, data yang telah dianalisis dengan cara reduksi dapat memberikan suatu gambaran yang jelas sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data, dapat didefinisikan sebagai kegiatan

mengorganisir data dengan menyusunnya dalam pola hubungan yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, baik berupa uraian singkat, tabel, maupun *flowchart*. Dengan adanya analisis penyajian data, maka dapat mempermudah peneliti dalam melihat dan memahami kondisi faktual serta dapat mempermudah proses perencanaan kerja pada tahap selanjutnya, sesuai dengan apa yang sudah peneliti pahami.

3. Simpulan

Simpulan, dapat didefinisikan sebagai suatu hasil temuan yang sebelumnya belum pernah ditemukan atau temuan baru yang dapat ditemukan dalam bentuk kalimat deskripsi maupun dalam bentuk gambaran mengenai sesuatu yang lebih jelas daripada sebelumnya dan diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan.